



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN RKT
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
S.D BULAN FEBRUARI 2022**

Nomor : LGIAT-09/PW12/P3A/2022
Tanggal : 10 Maret 2022



Nomor : LGIAT-09/PW12/6/2022
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Laporan Monitoring Rencana Kerja
Tahunan (RKT) s.d. Bulan Februari 2022
pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

10 Maret 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
di Yogyakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Monitoring Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta posisi s.d dengan Bulan Februari 2022, dengan uraian sebagai berikut:

1. Target Output Pengawasan

Sesuai dengan instrumen perencanaan pengawasan yang menjadi acuan berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Aplikasi SIMAREN dan Aplikasi SIMA RENLAKPOR pada Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta memiliki target sebanyak 106 PKPT dengan target Penugasan Pengawasan (PP) sebanyak 243 penugasan/laporan.

Rencana Penerbitan Laporan (RPL) atas output PKPT s.d. Bulan Februari 2022 2022 tidak terdapat target.

2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

Realisasi PKPT s.d. Bulan Februari 2022 berdasarkan penerbitan surat tugas dalam aplikasi SKI sebanyak 14 PKPT atau 13,20% dari target PKPT Tahun 2022 sebanyak 106 PKPT. Realisasi sebanyak 14 PKPT telah direalisasikan sebanyak 36 PP atau 14,31% dari target PP Tahun 2022 sebanyak 243 PP. Rincian adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		Tahun 2022		S.d Bulan ini		Tahun 2022	
		PKPT	PP	PKPT	PP	PKPT	PP
1	IPP	55	95	5	9	9,09	9,47
2	APD	22	63 [*]	5	19	22,73	30,16
3	AN	21	44	2	2	9,52	4,54
4	Investigasi	5	30	2	6	40,00	20,00
5	P3A	3	11	0	0	0,00	0,00
Jumlah		106	243	14	36	13,20	14,81

Keterangan:

) Pada Bidang APD jumlah penugasan sebanyak 63 PP termasuk penugasan SISWASKEUDES sebanyak 4 PP yang diampu oleh Bidang P3A dimana penugasan SISWASKEUDES melekat di PKPT bidang APD yaitu Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (ID PKPT Nomor 1923) dan sudah teralisasi 1 PP.

Sedangkan berdasarkan aplikasi SIMA, realisasi PKPT dihitung dari Surat Tugas yang statusnya sudah final, e-sign dan realisasi sebagai berikut:

No	Bidang	Target		Realisasi		Capaian	
		Tahun 2022		S.d Bulan ini		Tahun 2022	
		PKPT	PP	PKPT	PP	PKPT	PP
1	IPP	55	95	1	1	1,19	1,05
2	APD	22	63	2	5	9,09	7,94
3	AN	21	44	0	0	0,00	0,00
4	Investigasi	5	30	2	2	40,00	6,67
5	P3A	3	11	0	0	0,00	0,00
Jumlah		106	243	5	8	4,72	3,29

Perbedaan realisasi penerbitan ST antara aplikasi SKI dengan SIMA karena terdapat ST yang sudah terbit di SKI namun dalam aplikasi SIMA belum terbit karena belum dilakukan penginputan oleh tim ataupun yang masih dalam proses dalam aplikasi SIMA.

Rencana Penerbitan Laporan (RPL) s.d. bulan Februari 2022 tidak terdapat target, namun terdapat realisasi penerbitan laporan sebanyak 1 LHP (LHP belum terinput di SIMA RENLAKPOR).

3. Non PKPT

Tidak terdapat target untuk penugasan Non PKPT. Realisasi penugasan Non PKPT s.d. Februari 2022 sebanyak 16 PP dengan rincian per bidang sebagai berikut:

No	Bidang	Realisasi PP
1	IPP	4
2	APD	1
3	AN	3
4	Investigasi	0
5	P3A	8
Jumlah		16

Rincian Penugasan Non PKPT lihat lampiran

4. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. bulan Februari 2022 sebesar Rp 3.854.564.327,00 atau 12,74% anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 30.263.607.000, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Februari 2022 tercapai 12,74% sebagai berikut:

Kode Keg	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi sampai dengan Februari 2022	
			Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3)
Program Pengawasan Pembangunan				
3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	63.800.000	-	-
3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	22.590.000	-	-
3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	100.000.000	-	-
3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	172.800.000	-	-
3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	28.800.000	-	-
3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	28.800.000	-	-
3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	1.153.880.000	47.250.000	4,09
3701.UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	57.600.000	-	-
3701.UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	86.400.000	-	-
Jumlah 3701		1.714.670.000	47.250.000	2,76
Program Dukungan Manajemen				
3676-EBA.962	Layanan Umum	456.280.000	19.959.000	4,37
3676-EBA.994	Layanan Perkantoran	28.092.657.000	3.787.355.327	13,48
Jumlah 3676		28.548.937.000	3.807.314.327	13,34
Total		30.263.607.000	3.854.564.327	12,74

Demikian hasil Laporan Monitoring Rencana Kerja Tahunan (RKT) s.d. bulan Februari 2022 pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,

Ratna/Wijihastuti

NIP

DAFTAR PENUGASAN NON PKPT SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2022

Lampiran

Bidang	No	Nomor ST	Uraian
IPP	1	ST-27/PW12/2/2022	Memberikan Arahan pada Kegiatan Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 merujuk Surat Irwasda Polda DIY Nomor B/226/I/KEU./2022/Itwasda tanggal 18 Januari 2022 dan Monitoring Hasil Stock Opname pada Faskes Polda D.I. Yogyakarta.
	2	ST-22/PW12/2/2022	melakukan Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 Polda D.I.Yogyakarta merujuk Surat Irwasda Polda DIY Nomor B/226/I/KEU./2022/Itwasda tanggal 18 Januari 2022
	3	ST-15/PW12/2/2022	melakukan Audit Tujuan Tertentu Kewajaran Harga Pengadaan Darurat dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tahun 2021 pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai Surat PPK Non Konstruksi Nomor KN.01.02/XII.2/775/2022.
	4	ST-81/PW12/2/2022	melaksanakan Supervisi Audit Dukungan atas Laporan Keuangan DAM Operational Impovement Safety Project/ DOISPII (Loan IBRD No 8711-ID dan Loan AIBB No 00010-1-IDN)TA 2021 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
APD	1	ST-52/PW12/3/2022	menyerahkan Hasil QA Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kebumen Level 3 dan Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
AN	1	ST-19/PW12/4/2022	melaksanakan Monitoring atas Penempatan Dana pada PT Bank BPD DIY dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 31 Desember 2021.
	2	ST-90/PW12/4/2022	melakukan Evaluasi Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perumda PDAM Tirtamarta Yogyakarta
	3	ST-44/PW12/4/2022	melakukan Audit Kinerja pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY Tahun 2021, sesuai Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 537/0570 Tanggal 14 Januari 2022 perihal Permohonan Audit Laporan Keuangan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY Tahun 2021.
P3A	1	ST-26/PW12/6/2022	Mengikuti Workshop Coaching Awareness dan Menggali Potensi Pegawai
	2	ST-16/PW12/6/2022	menjadi narasumber Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) <i>Probity Audit</i> , dengan penekanan pada melaksanakan <i>Probity Audit</i> pada Proyek-proyek strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada Inspektorat Kabupaten Sleman.
	3	ST-83/PW12/6/2022	Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.
	4	ST-82/PW12/6/2022	Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.
	5	ST-63/PW12/6/2022	Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Magelang.
	6	ST-54/PW12/6/2022	penyerahan dan penjelasan area of improvement (Aoi) hasil penilaian Dupak semester I Tahun 2021 pada Inspektorat Kabupaten Kebumen.
	7	ST-55/PW12/6/2022	Penyerahan Hasil QA Kapabilitas APIP Level 3 dan Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan SPIP oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen.
	8	ST-41/PW12/6/2022	melakukan Penilaian DUPAK PFA pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta periode 1 Juli 2018 sd. 31 Desember 2021 merujuk Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor B-183/M.4.2/Cp.3/01/2022 dan Nomor B-184/M.4.2/Cp.3/01/2022 perihal Permohonan Penilaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Pertama.